



## **KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**Najla Hasna Lathifah<sup>1)</sup>**

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purwakarta”. Masalah dalam penelitian yaitu kurangnya kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam melaksanakan program pembinaan organisasi kemasyarakatan serta terdapat kekurangan dalam kualitas komunikasi antara Bakesbangpol dan ormas yang perlu diperbaiki. Selain itu, efisiensi dalam mencapai target masih kurang optimal, dengan adanya beberapa masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Identifikasi masalah yaitu bagaimana kinerja Bakesbangpol dalam pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purwakarta. Penelitian menggunakan teori dari Sutrisno (Sutrisno, 2020: 104-105) meliputi kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi Pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknis analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bakesbangpol dalam pembinaan Organisasi Kemasyarakatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya komunikasi yang kurang antara Bakesbangpol dengan Organisasi Kemasyarakatan, kemudian hasil yang di dapat dari segala usaha mengenai pembinaan Organisasi Kemasyarakatan belum sepenuhnya tercapai karena ada pembinaan masih kurang merata.

**Kata Kunci:** Kinerja, Pembinaan, Organisasi Kemasyarakatan

### **Abstract**

*This research is entitled "Performance of the National Unity and Political Agency in Guiding Community Organizations in Purwakarta Regency". The problem in the research is the lack of ability of the National Unity and Political Agency (Bakesbangpol) in implementing community organization development programs and there are deficiencies in the quality of communication between Bakesbangpol and mass*

*organizations that need to be improved. In addition, efficiency in achieving targets is still less than optimal, with several problems that have not been fully resolved. The problem identification is how the performance of Bakesbangpol in fostering Community Organizations in Purwakarta Regency. The research uses the theory from Sutrisno (Sutrisno, 2020: 104-105) including ability, improving results achieved, work enthusiasm, self-development, quality, and efficiency. The research method uses descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques include literature study, observation, interviews and documentation with data analysis techniques including data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the performance of Bakesbangpol in fostering Community Organizations has not fully run well, this can be seen from the lack of communication between Bakesbangpol and Community Organizations, then the results obtained from all efforts regarding the development of Community Organizations have not been fully achieved because there is still uneven coaching.*

**Keywords:** Performance, Development, Community Organization

## **PENDAHULUAN**

Berdirinya suatu organisasi merupakan wujud dari Pasal 24 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3). Organisasi dalam kehidupan bernegara sangat memiliki peran penting karena merupakan wadah yang diyakini dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan suatu tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran berkelompok. Sejalan dengan perwujudan dari Undang-undang tersebut, Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disingkat menjadi Ormas merupakan Organisasi yang didirikan secara sukarela dengan berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang, bahwa yang dimaksud Organisasi Kemasyarakatan adalah:

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang lahir pada masyarakat, mengakibatkan adanya pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Organisasi Kemasyarakatan untuk mewujudkan pelaksanaan berorganisasi yang tertib. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Bupati/Wali kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Ormas yang berbadan hukum di daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya”.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai yang tertuang pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing melalui Seksi Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentu saja dibutuhkan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang baik sebagai lembaga yang menaungi Organisasi

Kemasyarakatan (Ormas). Kinerja merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berdasarkan dari penilaian kualitas dan kuantitas terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang dipengaruhi oleh sumber daya organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, maupun sumber daya non fisik seperti peraturan, informasi dan kebijakan.

Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan hak dari Ormas yang terdaftar dan merupakan tugas pemerintah untuk menyelenggarakannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk mendukung Ormas agar bisa sejalan sesuai tujuan dan fungsinya serta menunjang kinerja Ormas. Pembinaan Ormas merupakan bagian dalam bentuk pemberdayaan Ormas. Ormas sendiri dilaksanakan melalui bentuk fasilitas kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia. Dalam implementasinya, upaya pemberdaan Ormas melalui pembinaan dan pengawasan ini diperjelas dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum BAB X perihal Pembinaan dan Pengawasan Pasal 33 ayat (4), bahwa pembinaan sebagaimana yang dimaksud antara lain dengan:

- a. Pemberdayaan pedoman;
- b. Standardisasi;
- c. Sosialisasi;
- d. Perencanaan;
- e. Pengembangan;
- f. Bimbingan;
- g. Asistensi; dan/atau
- h. Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah di

Jawa Barat yang memiliki sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat dibutuhkan untuk memberikan pembinaan dan melakukan penanganan preventif khususnya dalam menyikapi konflik yang terjadi di lingkungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas di Kabupaten Purwakarta seringkali belum tertata dan belum memiliki pola kerja yang matang sehingga menyebabkan masyarakat mempertanyakan peran yang dimiliki oleh Ormas. Kurangnya kegiatan yang dilaksanakan dipicu karena faktor Sumber Daya yang dimiliki oleh Ormas, baik Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum menguasai pengetahuan seputar tugas dan fungsi yang dimiliki maupun Sumber Daya lainnya seperti sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang.

Kepala Seksi Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta melaporkan per tahun 2023 bahwa di Kabupaten Purwakarta terdapat 240 organisasi yang terdaftar, akan tetapi hanya berjumlah 40 Organisasi Kemasyarakatan yang aktif berkegiatan dan rutin melapor setiap tahunnya. Masih banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang tidak rutin melapor kegiatan dan ke aktifannya sehingga perlu dipertanyakan bagaimana keadaan Organisasi Kemasyarakatan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan menurut (Sutrisno: 2016) kinerja dapat dinilai dengan melihat suatu kemampuan, usaha, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, serta efisiensi. Hasil observasi awal peneliti bahwasannya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purwakarta dalam membina Organisasi Kemasyarakatan masih kurang optimal, terutama dalam aspek pembinaan, yang terlihat dari kurangnya keterampilan Ormas

dalam menyusun program kerja. Anggota ormas mengeluhkan minimnya kegiatan pembinaan dari Bakesbangpol. Kapabilitas pegawai Bakesbangpol juga perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja yang lebih baik. Meskipun etos kerja pegawai sudah cukup baik, motivasi yang kurang mempengaruhi konsistensi kinerja. Pengembangan diri pegawai diperlukan untuk menghadapi tantangan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang banyak. Kualitas pelayanan kepada ormas juga masih perlu diperbaiki agar dapat menciptakan organisasi yang berkualitas. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bakesbangpol.

Penelitian ini secara umum akan membahas mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam rangka menciptakan Organisasi Kemasyarakatan yang tertib dan berkualitas mengingat banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tuuan Organisasi Kemasyarakatan membuat dinamika ke organisasian masyarakat sangat tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti, dan yang terjadi di lapangan mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purwakarta.

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berfungsi untuk menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data hingga tahap membuat kesimpulan atas semua hasil dari penelitian.

Jumlah informan yang diteliti berjumlah 5 (lima) informan, terdiri dari: Kepala Seksi Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta, Staff Seksi Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta, Ketua Ormas DPC BPPKBB Kabupaten Purwakarta, Seksi Humas Ormas Grib Jaya Hercules Kabupaten Purwakarta, dan Sekretaris Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Purwakarta.

Metode penelitian di dalamnya tersusun berbagai cara, teknik dan strategi dalam melakukan penelitian di lapangan. Dalam hal mencari sumber data, peneliti melakukan sumber data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan 3 (tiga) tahapan, yakni: studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara), dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono: 2013).

## **PEMBAHASAN**

Kinerja suatu lembaga berperan penting dalam tercapainya suatu tujuan yang dibentuk, dimana kinerja tersebut didasarkan dari penelitian kualitas dan kuantitas terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan dan melaksanakan suatu pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan agar terciptanya Organisasi Kemasyarakatan yang berkualitas.

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti akan membahas mengenai bagaimana kinerja yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purwakarta berdasarkan dimensi teori yang dikemukakan oleh (Sutrisno: 2016) yang kemudian

digunakan peneliti dalam membantu, mengetahui, menjabarkan, dan mendeskripsikan bagaimana hasil penelitian peneliti di lapangan.

a. Kemampuan

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Sebuah organisasi pasti terdapat sumber daya manusia yang memiliki peran sebagai unsur pelaksana atau penggerak dari suatu organisasi. Apabila tidak ada sumber daya manusia dalam organisasi maka hanya menjadi suatu kata saja tidak ada suatu kegiatan di dalam kehidupan nyata. Sumber daya manusia menjadi suatu kendala yang sering dihadapi setiap organisasi, karena tidak semua sumber daya manusia dapat selamanya melaksanakan suatu tugasnya dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi suatu kinerja organisasi dalam memperoleh hasil yang baik untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Sutrisno, Kemampuan dimaksudkan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas - tugas yang diembannya kepada mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam dimensi Kemampuan dapat peneliti analisis bahwa dimensi tersebut sudah berjalan cukup optimal sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sutrisno mengenai kemampuan. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu perkembangan dari Kesbangpol dalam melayani Ormas serta mendukung dan mengawasi setiap kegiatan yang akan dilakukan Ormas dalam segala kegiatan. Dibuatkannya suatu website untuk mendata ormas



merupakan Langkah yang dinilai efisien karena memudahkan dan menjangkau Ormas dalam memverifikasi keaktifan mereka.

Gambar 1.1 Tampilan Form Pelaporan Ormas Pada Website Kesbangpol Purwakarta



Sumber: [kesbangpol.purwakarta.go.id](http://kesbangpol.purwakarta.go.id)

b. Meningkatkan Hasil yang dicapai

Menurut Sutrisno dalam (Sutrisno, 2020) meningkatkan hasil yang dicapai merupakan berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan.

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur pada tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno, peneliti dapat menganalisis bahwa sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari rutusnya pembinaan yang diberikan kepada para ormas. Bakesbangpol rutin melakukan evaluasi kinerja dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan

para ormas agar bisa mentehau apa saja yang harus diperbaiki kedepannya.

c. Semangat Kerja

Kinerja organisasi menggambarkan seberapa jauh suatu organisasi merealisasikan tujuan akhirnya. Menurut Sutrisno dalam (Sutrisno, 2020), semangat kerja ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Berdasarkan teori menurut Sutrisno dan hasil penelitian, dapat peneliti analisis bahwa dimensi semangat kerja dengan aspek motivasi pemimpin dan lingkungan kerja sudah dilaksanakan dengan baik. Para pimpinan di Bakesbangpol selalu berupaya mengayomi para staf nya dan memberikan motivasi, kemudian motivasi tersebut didapatkan oleh pegawai salah satunya melalui kegiatan diklat yang menjadi wadah pelatihan sekaligus wadah membangun semangat kerja para pegawai yang diharapkan dapat menjadi faktor penunjang peningkatan kualitas kinerja pegawai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah memberikan lingkungan kerja yang nyaman. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas kantor yang baik dan teratur.

d. Pengembangan Diri

Pengembangan diri dalam (Sutrisno, 2020), merupakan senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi.

Peneliti melakukan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teori yang disampaikan oleh Sutrisno mengenai dimensi mutu dengan aspek kualitas pegawai. Peneliti menganalisis bahwa dimensi ini sudah dilakukan

oleh Bakesbangpol. Bakesbangpol selalu berupaya untuk menghadapi setiap tantangan dalam melakukan pembinaan secara bijak, professional dan tepat. Bakesbangpol pun mengupayakan dalam menghadapi tantangan dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan ormas yaitu dengan cara mendengarkan pendapat dan masukan-masukan juga dari ormas yang bersangkutan agar bisa mendapatkan suatu Keputusan yang 98 tepat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sutrisno bahwa jika para pegawai sudah mampu untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan harapannya untuk kebaikan organisasi, maka para pegawai sudah melakukan pengembangan diri dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

e. Mutu

Mutu menurut Sutrisno dalam (Sutrisno, 2020), yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Kualitas, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan kegiatan dalam memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti antara teori yang dikemukakan oleh Sutrisno dengan hasil penelitian dapat peneliti analisis bahwa dimensi mutu mengenai kualitas pegawai ini masih belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi antara Bakesbangpol dengan ormas yang masih sering terjadi kesalahpahaman atau tidak sampainya informasi yang jelas dari ormas kepada Bakesbangpol maupun sebaliknya mengenai program atau pembinaan yang akan dijalankan. Ormas mengeluhkan seringnya ada ketidaksesuaian informasi yang mereka terima dari Bakesbangpol. Lalu

Bakesbangpol juga tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai program atau rencana program yang akan dilakukan oleh ormas karena Bakesbangpol sebagai wawah dari ormas perlu mengetahui apa saja rencana atau program dari para ormas agar semuanya bisa berjalan efektif.

f. Efisiensi

Menurut Sutrisno dalam (Sutrisno, 2020), efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan.

Dalam dimensi efisiensi dapat peneliti analisis bahwa di Bakesbangpol belum berjalan baik. Bakesbangpol telah mengeluarkan seluruh sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, anggaran maupun peralatan secara maksimal tetapi hasil dari kegiatan pembinaannya masih belum sepenuhnya terwujud karena masih adanya bentrokanbentokan kecil antar ormas dan masih banyaknya ormas yang belum terdata atau terdaftar. Hal ini karena maksud dari teori mengenai efisiensi menurut Sutrisno ini yaitu setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi atau Lembaga harus sesuai dengan hasil yang mereka akan dapatkan

## **KESIMPULAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dimensi operasionalnya. Dalam hal kemampuan, Bakesbangpol telah berhasil mengoptimalkan keterampilan pegawai dan profesionalisme mereka, terlihat dari kemudahan dalam memverifikasi keaktifan ormas dan arahan yang

diberikan untuk organisasi kemasyarakatan. Dari segi hasil yang dicapai, produktivitas pegawai tinggi dan evaluasi kinerja rutin dilakukan untuk perbaikan. Semangat kerja juga baik, didorong oleh motivasi pemimpin dan lingkungan kerja yang nyaman. Pengembangan diri dihadapi dengan bijak, dengan kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Namun, dalam hal mutu, terdapat kekurangan dalam kualitas komunikasi antara Bakesbangpol dan ormas yang perlu diperbaiki. Selain itu, efisiensi dalam mencapai target masih kurang optimal, dengan adanya beberapa masalah yang belum sepenuhnya teratasi.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Purwakarta, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta, peneliti menyarankan agar memberikan sosialisasi mengenai pembinaan dan peran ormas di masyarakat lebih aktif kepada organisasi masyarakat di Kabupaten Purwakarta baik secara langsung atau dengan memanfaatkan media sosial dengan membuat poster-poster yang menarik dan mudah dijangkau disebarakan melalui media sosial ataupun pesan langsung di aplikasi pesan.
2. Bagi seluruh organisasi Masyarakat di Kabupaten Purwakarta agar menjalankan fungsi dan perannya di lingkungan Masyarakat, dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti ikut melakukan musyawarah dan memberi masukan kepada para warga Ketika terjadi sebuah permasalahan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintoro, & Daryanto. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Gava Media: Yogyakarta.
- Mandak, N. W., & Donald K. Monintja, R. (2022). Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Adat (Studi Kasus di Badan Kesbangpolda). *Jurnal Governance, Vol. 2, No. 1*, 1-11.
- Marwansyah. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Mongkaren, D. Y., & Donald K. Monintja, W. (2023). Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan. *Eksekutif, Vol. 3, No. 2*, 2-7.
- Rismawati, & Mattalata. (2018). *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi ke depan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Soekanto, S. (2018). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

### **Undang-Undang:**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Pasal 41 ayat (3)
- Perturan Menteri dalam Negeri 58 Tahun 2017 pasal 33 ayat (4)
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021

